

**PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH JAWA TIMUR  
DALAM PELAKSANAAN PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN  
STANDAR PROGRAM SIARAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Ilmu Administrasi Negara Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur



Oleh :

**YASA MUAZHAR**  
**NPM. 1041010019**

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
SURABAYA  
2014**

**PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH JAWA TIMUR  
DALAM PELAKSANAAN PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN  
STANDAR PROGRAM SIARAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Ilmu Administrasi Negara Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran “ Jawa Timur



Oleh :

**YASA MUAZHAR**  
**NPM. 1041010019**

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
SURABAYA  
2014**

PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH JAWA TIMUR  
DALAM PELAKSANAAN PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN  
STANDAR PROGRAM SIARAN

Disusun Oleh :

YASA MUAZHAR  
NPM : 1041010019

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui :

Pembimbing,

Dra. Sri Wibawani, M.Si  
NIP. 196704061994032001

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dra.Ec. Hj. Suparwati, M.Si  
NIP. 19550718 198302 2001

PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH JAWA TIMUR  
DALAM PELAKSANAAN PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN  
STANDAR PROGRAM SIARAN

Disusun Oleh :

YASA MUAZHAR  
NPM : 1041010019

Telah Dipertahankan Dihadapan Dan Diterima Oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Pada Tanggal : 10 Juli 2014

Dosen Pembimbing,

Tim Penguji :

1. Ketua,

Dra. Sri wibawani, M.Si  
NIP.196704061994032001

Dr. Lukman Arif, M.Si  
NIP.196411021994031001

2. Sekretaris,

Dr. Ertien Rining N, M.Si  
NIP.19680116199402001

3. Anggota,

Dra. Sri Wibawani, M.Si  
NIP.196704061994032001

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran “ Jawa Timur

Dra.Ec. Hj. Suparwati, M.Si  
NIP.19550718 198302 2001

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penelitian yang berjudul “PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH JAWA TIMUR DALAM PELAKSANAAN PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN”.

Pembuatan Skripsi ini, merupakan bagian dari program studi Ilmu Administrasi Negara yang wajib diselesaikan oleh Mahasiswa, untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1). Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Tersusunnya Skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar besarnya kepada Ibu Dra. Sri Wibawani, M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis. disamping itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Penelitian ini, diantaranya :

1. Ibu Dra. Ec. Hj. Suparwati, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak DR. Lukman Arif, M.Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara UPN “Veteran” Jawa Timur.

3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak/Ibu Komisioner KPID Jawa Timur, serta Staf dan rekan-rekan KPID Jawa Timur. Yang telah membantu dan memberi kesempatan kepada penulis, melakukan kegiatan penelitian sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana.
5. Buat kedua Orang tua Bapak’ Musthofa dan Ibu’ Sri Umayati serta Keluarga tercinta. Terima kasih sudah memberi kesempatan Penulis untuk mengenyam bangku Perkuliahan.
6. Buat Keluarga de.vils\_pueblic: pee.ek Ali(kuman), Adit, Arga(ultramen), Enggar(Item), pee.ek Lamongan, Mamat, Aceng, Bagus. Atmoko, Diana, Dini, Shinta dan Teman-teman ADNE 2010. Matur nuwun atas kebersamaan serta semangat yang telah diberikan.
7. Buat Si emaa.ak “Wury Nur Hidayati” Terima kasih buat semangat dan marah-marahnya.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menyadari masih ada kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu penulis senantiasa bersedia dan terbuka dalam menerima saran, kritik dari semua pihak yang dapat menambah kesempurnaan Skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih, serta besar harapan penulis. Semoga Skripsi ini, dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surabaya, Juli 2014

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR .....	viii
DAFTAR TABEL .....	ix
ABSTRAKSI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Landasan Teori .....	14
1. Pengertian Peran.....	14
2. Kebijakan Publik.....	15
a. Pengertian Kebijakan Publik.....	16
3. Birokrasi .....	18
a. Pegertian Birokrasi.....	18
b. Karakteristik Birokrasi .....	19
c. Fungsi dan Posisi Birokrasi.....	20
4. Organisasi .....	21
a. Pengertian Organisasi .....	21
b. Prinsip-prinsip Organisasi .....	23
5. Pengawasan .....	26
a. Pengertian Pengawasan .....	26

b. Tujuan Pengawasan .....	28
c. Manfaat Pengawasan .....	39
d. Unsur Pengawasan.....	30
C. Kerangka Berfikir.....	32

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	33
B. Fokus Penelitian .....	34
C. Lokasi Penelitian .....	35
D. Jenis dan Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data .....	42
F. Teknik Analisis Data.....	44
G. Keabsahan Data.....	46

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
1. Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur .....	51
2. Fungsi, Wewenang, Tugas dan Kewajiban Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur .....	53
3. Wilayah Pemantauan Isi Siaran Televisi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur .....	56
1. Struktur Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Timur .....	60
a. Tugas Sekretariat KPID Provinsi Jawa Timur .....	60
2. Komposisi Pegawai Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Timur .....	63
B. Hasil Penelitian	
1. Mengawasi Pelaksanaan Peraturan dan Pedoman Perilaku Penyiaran	



Serta Standar Program Siaran.....	66
2. Memberikan Sanksi Terhadap Pelanggaran Peraturan dan	
Pedoman Perilaku Penyiaran Serta Standar Program Siaran.....	72
3. Melakukan Koordinasi dan/atau Kerjasama dengan Pemerintah,	
Lembaga Penyiaran, dan Masyarakat .....	83
a. Koordinasi dan/atau Kerjasama dengan Pemerintah.....	84
b. Koordinasi dan/atau Kerjasama dengan Lembaga Penyiaran .....	87
c. Koordinasi dan/atau Kerjasama dengan Masyarakat .....	90
C. Pembahasan.....	93
1. Mengawasi Pelaksanaan Peraturan dan Pedoman Perilaku Penyiaran	
Serta Standar Program Siaran.....	94
2. Memberikan Sanksi Terhadap Pelanggaran Peraturan dan	
Pedoman Perilaku Penyiaran Serta Standar Program Siaran.....	96
3. Melakukan Koordinasi dan/atau Kerjasama dengan Pemerintah,	
Lembaga Penyiaran, dan Masyarakat .....	97
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAKSI

### YASA MUAZHAR NPM 1041010019, PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH JAWA TIMUR DALAM PELAKSANAAN PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN

Televisi dan radio sudah menjadi kebutuhan setiap manusia, dalam rangka memperoleh informasi dan hiburan. Hal ini yang terkadang dimanfaatkan oleh lembaga penyiaran baik televisi maupun radio, dikarenakan lembaga penyiaran adalah sebuah Perusahaan. Dimana dalam menjalankan setiap aktifitasnya, dituntut untuk selalu berinovasi, berdaya saing/berlomba-lomba guna memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Sehingga banyak lembaga penyiaran mengesampingkan nilai-nilai, serta budaya yang berlaku di masyarakat, dengan cara menayangkan program siaran yang tidak sehat.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini pertama adalah mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, fokus kedua adalah memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, fokus ketiga adalah melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat. Penelitian ini dengan menggunakan model interaktif Miles and Huberman (1992: 20) Terjemahan dari Tjetjep Rohendi Rohidin. Keabsahan data pada penelitian ini meliputi credibility (derajat kepercayaan); transferability (keteralihan); dependability (ketertanggung); konfirmability (kepastian).

Hasil dari penelitian ini adalah pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran sudah tersusun dan ditetapkan pada tahun 2012, dalam pelaksanaan pengawasan bisa dikatakan belum optimal dikarenakan masih minimnya peralatan yang digunakan untuk mengawasi isi siaran di televisi. Pemberian sanksi yang dilakukan KPID Jawa Timur hanya sampai dengan sanksi administratif/teguran tertulis hingga pengurangan durasi program acara, hal ini dikarenakan minimnya kewenangan yang diberikan oleh KPID Jawa Timur dalam menjatuhkan sanksi terhadap lembaga penyiaran yang terbukti melakukan pelanggaran isi siaran. Koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah, Lembaga Penyiaran dan Masyarakat telah dilakukan dengan serangkaian acara misalnya pengawasan siaran kampanye melalui media televisi, sosialisasi, workshop serta literasi media. Peran KPID Jawa Timur sangatlah penting baik dalam melakukan pengawasan maupun memberikan sanksi terhadap isi siaran, dengan adanya koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait diharapkan KPID Jawa Timur mampu merepresentasikan kepentingan publik.

Kata Kunci : Peran, pelaksanaan, pengawasan, koordinasi dan kerjasama

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 F berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Dalam era globalisasi seperti saat ini, manusia sebagai makhluk sosial tidak akan bisa terlepas dari alat telekomunikasi. Karena komunikasi juga diartikan sebagai kebutuhan setiap manusia untuk memperoleh informasi, dapat dikatakan televisi dan radio merupakan salah satu media masa yang efektif dalam menjalin suatu komunikasi. Khususnya di Republik Indonesia, televisi dan radio saat ini telah menjadi barang biasa di rumah, kantor bisnis, maupun institusi, khususnya sebagai sumber kebutuhan akan hiburan, berita, serta menjadi media periklanan.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi baik televisi maupun radio. Telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besaruntutannya, akan hak untuk mengetahui, dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Manfaat televisi dan radio dapat dirasakan berdasarkan prespektif masing-masing orang. Jika selama ini televisi hanya dianggap sebagai hiburan, tentu

saja penonton akan mendapat hiburan. Jika penonton menganggap televisi merupakan salah satu media untuk memperoleh pengetahuan, maka manfaat yang dirasakanpun akan menjurus kepada hal tersebut. Salah satu manfaat dari televisi dan radio adalah sebagai penambah wawasan terkini mulai dari berita, hobby, gaya hidup, hingga dunia. Wawasan ini dirangkum dalam sebuah konsep acara tertentu. Program yang memberikan wawasan bermanfaat terlaris adalah berita, baik berita mengenai politik, ekonomi, pendidikan, seni, hingga olah raga yang mampu memberikan manfaat bagi penonton.

Lembaga penyiaran sebagai penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, pemerintah sebagai pembuat regulasi mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Pasal 7 Undang-undang Republik Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran :

1. Komisi penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) disebut Komisi Penyiaran Indonesia, disingkat KPI;
2. KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran;
3. KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi;

4. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran :

1. KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran;
2. Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPI mempunyai wewenang:
  - a. Menetapkan standar program siaran;
  - b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
  - c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program;
  - d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
  - e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran :

1. KPI wajib mengawasi pelaksanaan pedoman perilaku penyiaran;

2. KPI wajib menerima aduan dari setiap orang atau kelompok yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran;
3. KPI wajib menindaklanjuti aduan resmi mengenai hal-hal yang bersifat mendasar;
4. KPI wajib meneruskan aduan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan dan memberikan kesempatan hak jawab;
5. KPI wajib menyampaikan secara tertulis hasil evaluasi dan penilaian kepada pihak yang mengajukan aduan dan Lembaga Penyiaran yang terkait.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran merupakan dasar bagi pembentukan Komisi Peyiaran Indonesia (KPI), semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik, harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan.

Proses Demokratisasi Penyiaran di Indonesia, menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Artinya adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan, memberi informasi publik yang sehat. Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dll. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002

tentang Penyiaran, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengamanatkan semangat demokratisasi dalam ranah penyiaran. Harapan ini berbanding lurus dengan sistem sosial dan politik Indonesia yang mengarah pada sistem yang demokratis setelah bangsa Indonesia masuk Era Reformasi. Demokratisasi politik merambah pada demokratisasi penyiaran.

Demokratisasi dalam bidang penyiaran secara substansial bermakna berkurangnya atau bahkan hilangnya hegemoni kekuasaan politik terhadap dunia penyiaran. Sistem penyiaran demokratis mengandaikan masyarakat diberi kepercayaan untuk mengatur dunia penyiaran. Negara atau pemerintah mempercayakan regulasi penyiaran pada rakyat. Rakyat itulah yang direpresentasikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) apabila di daerah.

Demokratisasi penyiaran juga bisa dimaknai dengan adanya diversity of content (keragaman isi), diversity of ownership (keragaman kepemilikan) dan diversity of voice (keragaman pendapat dan suara). Artinya, monopoli kepemilikan media seharusnya tidak diperkenankan. Sementara isi siaran seharusnya tidak boleh lagi seragam dan bersifat sentralistik. Independen dalam Komisi Penyiaran Indonesia adalah untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik, harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur di bentuk karena amanah dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 pasal

7 ayat 4. Yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terdiri dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pusat, di bentuk tingkat pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) daerah, di bentuk di tingkat provinsi. Dengan tujuan pasal 7 ayat 2, untuk mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Sebagaimana di atur dalam ketentuan pasal 9 dan 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur berjumlah 7 orang yang di pilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.

Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.

Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur sudah berlangsung selama IV periode, dimulai dari periode I masa jabatan tahun 2003-2007, periode II masa jabatan tahun 2007-2010, periode III masa jabatan tahun 2010-2013. Pada hari jum'at tanggal 11 Oktober 2013 di Gedung Negara Graha Surabaya. Gubernur Jawa Timur Soekarwo melantik



kepengurusan baru Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur periode IV untuk masa jabatan tahun 2013-2016.

Sebanyak tujuh komisioner itu diminta untuk lebih bisa menjaga informasi yang disampaikan media penyiaran kepada masyarakat. Menurut gubernur, ini karena fungsi informasi yang adil dari media diyakini bisa membawa suasana yang nyaman dan aman. “Memberikan keseimbangan dan keadilan antar lembaga penyiaran”. Konkritnya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) tidak berpihak pada satu media saja.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)/Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), membuat regulasi berupa Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) yang dimasukkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Tujuannya adalah menegakkan aturan-aturan mengenai pelanggaran program siaran, merusak nilai-nilai, dan budaya yang berlaku di masyarakat. Sehingga diharapkan masyarakat mendapatkan siaran yang sehat dan bermartabat. Masyarakat berhak mendapatkan siaran yang sehat dan bermartabat, karena frekuensi adalah milik publik bukan milik individu atau golongan.

Dalam kenyataannya, banyak lembaga penyiaran tidak menjalankan ketentuan isi siaran sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Hal ini dibuktikan dengan data berikut ini :

Tabel 1  
Rekapitulasi Laporan Monitoring Jawa Timur Pengawasan Isi Siaran  
Bulan Januari – April Tahun 2014

No	Bulan	Pelanggaran		
		Seksualitas	Kekerasan	Merokok/Napza/Minuman Beralkohol
1	Januari	30	22	13
2	Februari	33	54	10
3	Maret	39	54	9
4	April	51	43	9
Jumlah		153	173	41

Sumber : Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur Tahun 2014

Televisi dan radio sudah menjadi kebutuhan setiap manusia, dalam rangka memperoleh informasi dan hiburan. Hal ini yang terkadang dimanfaatkan oleh lembaga penyiaran baik televisi maupun radio, dikarenakan lembaga penyiaran adalah sebuah Perusahaan. Dimana dalam menjalankan setiap aktifitasnya, dituntut untuk selalu berinovasi, berdaya saing/berlomba-lomba guna memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Sehingga banyak lembaga penyiaran mengesampingkan nilai-nilai, serta budaya yang berlaku di masyarakat, dengan cara menayangkan program siaran yang tidak sehat.

Merdeka.com - Setelah joget Caesar, kini tren goyang oplosan yang dipopulerkan artis Soimah pada program Yuk Keep Smile (YKS) di Trans TV.

Belakangan orang tua mulai prihatin dengan joget oplosan yang dinilai terlalu vulgar karena mulai diikuti anak-anak. Gerakan joget itu sendiri sebenarnya simpel. Ketika lagu sudah memasuki bagian reff, sekelompok orang membuat barisan berjejer dan menghadap ke kanan atau ke kiri secara bergantian. Kemudian, tangan kanan berada di kening, dan tangan kiri di pinggang belakang, dan bagian panggul ditonjolkan ke depan. Pinggul kemudian diayun-ayunkan naik turun. Badan pun ikut bergerak maju mundur. Gerakan ini berulang dilakukan sampai bagian reff lagu selesai. "Anak saya juga sudah pinter joget-joget seperti itu, padahal itu gerakannya agak vulgar," curhat seorang bapak Rian, kepada merdeka.com, Senin (30/12).

Berdasarkan data dan fenomena tren goyang oplosan di atas, yang dipopulerkan artis Soimah pada program YKS. Tayang di salah satu televisi swasta ini, melanggar ketentuan Standar Program Siaran (SPS) BAB XII mengenai Pelarangan dan Pembatasan Seksualitas Pasal 18 poin (i) menampilkan gerakan tubuh dan/atau tarian erotis.

Dari data dan fenomena diatas menunjukkan, dengan adanya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur, tidak menutup peluang bagi lembaga penyiaran melakukan pelanggaran melalui isi siaran, hal ini yang membuat penulis melakukan sebuah penelitian mengenai “Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur Dalam Pelaksanaan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran”.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yaitu : Bagaimana Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur Dalam Pelaksanaan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan : Untuk Mengetahui Bagaimana Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur Dalam Pelaksanaan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah dan untuk menerapkan teori-teori yang para penulis peroleh selama perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Bagi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran sebagai masukan dalam rangka meningkatkan Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur Dalam Pelaksanaan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.
3. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, akan melengkapi ragam penelitian yang telah dibuat oleh para mahasiswa dan dapat menambah bahan bacaan dan referensi dari satu karya ilmiah.